

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Sidrap Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD P) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah. Rencana kerja dan pendanaan dan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sementara itu searah dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2023

(Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka.

Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 masih dalam suasana Pandemi Corona Virus Deciace (COVID) 19 yang melanda bangsa ini sehingga perangkat daerah dalam melaksanakan program,kegiatan dan sub kegiatan dengan kondisi anggaran yang sebahagian besar masih dialokasikan untuk menangani Pandemik Covid 19. Yang tentunya tetap mengacu pada rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019–2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) dan Perubahan Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019–2023 yaitu

**“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”**,

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi.

- 1.Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- 2.Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
- 5.Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance*.

6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

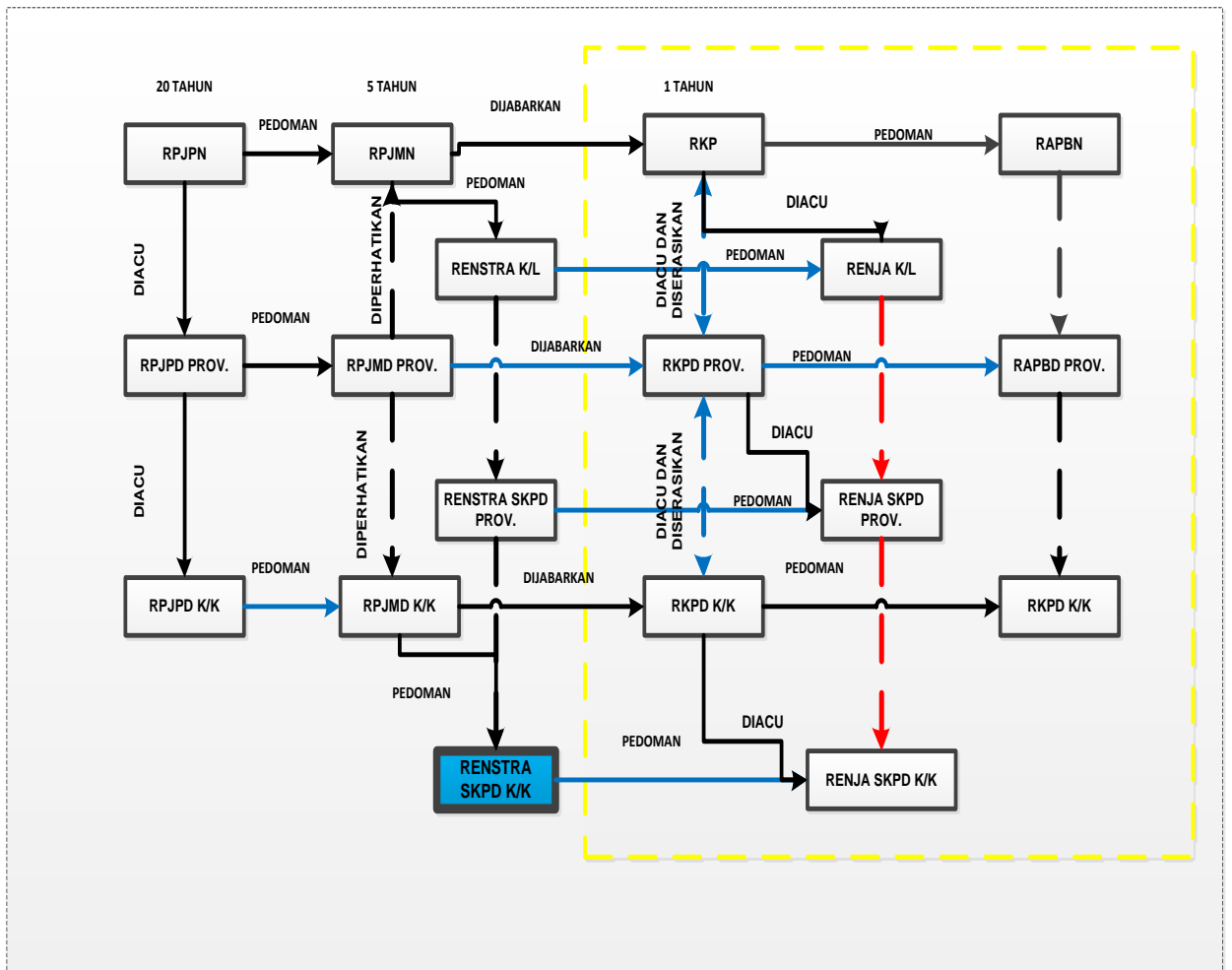
Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra OPD

Penyusunan renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup

- a. Tahap perumusan rancangan renja OPD
- b. Tahap penyajian rancangan renja OPD

Keterkaitan antara rencana kerja OPD dengan Dokumen RKPD dapat dilihat dalam bagan tersebut di bawah ini :



Gambar 1.1

### Keterkaitan antara renja OPD dengan dokumen RKPD

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023;
- m. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun Anggaran 2020 Nomor 54);

- n. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor 19);
- o. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor 36);
- p. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2023<sup>2</sup> tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
- q. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 – 2023.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Bappelitbangda adalah:

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda sampai dengan Triwulan II Tahun 2022
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I PENDAHULUAN,** pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD,** memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

**2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD,** berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang tujuan sasaran jangka menengah bappelitbangda

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahu anggaran 2023

**BAB V PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

#### **BAB II**

Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2023



## **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD**

Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappelitbangda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2023.

Pelaksanaan Renja tersebut terintegrasi dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan.

Adapun untuk tahun anggaran 2021 sampai dengan terdiri dari 4 Program, 17 Kegiatan dan 168 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 8.270.048.000 dan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 7.831.692.700 dengan realisasi sampai dengan realisasi belanja 7.351.183.719 (93.86%) dan Realiasi Fisik (98.75%) kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2021, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Bappelitbangda

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai “*Pengarah*”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan tahun mendatang. Bagi manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja dipandang sebagai :

- Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Renja sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan pencapaian Renstra Tahun 2021 Badan

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 1**  
**REKAPITULASI HASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019 DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2021**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10(5+7+9)	11(10/4*100)
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran</b>								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen bermaterai	7200	1160	625	607	97.12	1550	3,317	46.07
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah (Asuransi)	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	105	45	15	13	86.67	15	73	69.52
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan Administrasi jasa Keuangan	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00

	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00
	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis Peralatan Kerja Kerja yang diperbaiki	50	30	36		-	6	36	72.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	202	45	35	20	57.14	93	158	78.22
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	535	65	80	79	98.75	92	236	44.11
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100	4	30	29	96.67	30	63	63.00
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	60	12	12	12	100.00	12	36	60.00
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>								
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	5	3		0		1	4	80.00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor kantor yang diadakan	23	12	4	4	100.00	3	19	82.61
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor kantor yang diadakan	35	15	9	9	100.00	10	34	97.14
	Pengadaan Meubeleur	Jumlah meubeleur kantor kantor yang diadakan	75	10	70	70	100.00	55	135	180.00
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara rutin/berkala	105	36	15	12	80.00	15	63	60.00

	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>Presentase capaian kinerja keuangan</b>								
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKjIP,Renstra,Renja,RKA & DPA SKPD	30	14	6	6	100.00	6	26	86.67
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10	6	2	2	100.00	2	10	100.00
<b>4</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah</b>	<b>Terlaksananya Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah</b>								
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan & SDM	Terlaksananya penelitian & penembangan bidang pemerintahan & SDM	20	0	4	4	100.00	0	-	0.00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya penelitian & penembangan bidang Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan Pembangunan	20	4	4	4	100.00	4	12	60.00
<b>5</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Terjalannya Koordinasi dalam Kerjasama Pembangunan Daerah</b>								
	Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah	Tersusunnya RAD dan Pelaporan berbasis Sistem PPK	5	3				1	4	80.00
	Penyusunan Dokumen SDGS	Dokumen SDGS	1		1	1	100.00	1	1	100.00
<b>7</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)</b>	<b>Terlaksananya Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)</b>								

	Pengembangan Sistim Inovasi Daerah	Jumlah hasil inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	40	3				4	7	17.50
	Peningkatan Kapasitas Data & Publikasi Risertrt & Teknologi	Data Kelitbangan	20	0	4	4	100.00	4	8	40.00
<b>8</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>Terwujudnya kebijakan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>								
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD)	Tersusunnya Dokumen RPJMD	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RTRW)	Tersusunnya Dokumen RTRW	1		1	1	100.00	1	1	100.00
<b>9</b>	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</b>	<b>Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota-kota menengah dan besar</b>								
	Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen RP3M,RPJIM , One data dan Sistim Informasi	25	5	4	4	100.00	5	14	56.00
	Operasioanal Pamsimas	Dokumen Perencanaan Sanitasi	8	4	1	1	100.00	1	6	75.00
	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Tersedianya air minum dan sanitasi	2	1	1	1	100.00	1	1	50.00
	Koordinasi Penataan Ruang	Perda RTRW	5	1	1	1	100.00	1	1	20.00
<b>10</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah(RPJPD,RPJMD,Renstr a SKPD, Renja SKPD, dan RRPD) sesuai kalender, sesuai dengan penetapan dan isinya sesuai regulasi</b>								

	Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Jumlah Kegiatan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPDP Kabupaten Sidenreng Rappang, Musrenbang Provinsi dan Nasional	36	21	7	7	100.00	6	34	94.44
	Penetapan RKPDP	Jumlah dokumen RKPDP Pokok & Perubahan	10	6	3	3	100.00	2	11	110.00
	Penyusunan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD yang disusun	1	1	1	1	100.00	0	1	100.00
	Monev, pengendalian dan pelaporan	- Jumlah Laporan Realisasi Fisik/Keuangan Program/kegiatan Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidrap - Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPDP, Renstra dan RPJMD	20	12	6	6	100.00	4	22	110.00
	Pengelolaan Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD)	Jumlah aplikasi sipd dan aplikasi simda yang dikembangkan dan dikelola	5	1	2	2	100.00	1	4	80.00
	Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Jumlah dokumen KUA dan PPAS pokok dan perubahan yang tersusun	4	2					2	50.00
	Koordinasi penyusunan Data DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi	Jumlah pengusulan dan pelaporan pelaksanaan sumber sumber dana DAK, APBD Provinsi, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi	20	5	5	5	100.00	1	11	55.00
	Pelaksanaan Asistensi RKA dan RKAP	Jumlah kegiatan asistensi penyusunan renstra, renja, RKA APBD, RKPA APBDP	20	6				4	10	50.00



	Sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Jumlah dokumen rencana penerapan spm, pelaporan penerapan spm, dokumen iku, ikk dan pelaporan iku dan ikk	6		3	3	100.00	1	4	66.67
<b>1 1</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Tingkat kinerja Perencanaan pembangunan ekonomi</b>								
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang difasilitasi	35	6	10	10	100.00	7	23	65.71
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah program Kemiskinan yang difasilitasi	10	2	4	4	100.00	2	8	80.00
	Koordinasi Kerjasama Forum TSLP/CSR	Jumlah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan TSLP/CSR	32		17	17	100.00	2	19	59.38
<b>1 2</b>	<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>	<b>Tingkat kinerja Perencanaan Sosial Budaya</b>								
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial yang difasilitasi	20	8	21	21		8	37	185.00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang budaya yang difasilitasi	20	8	7	7	100	8	23	115.00
	Koordinasi dan Monev Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Jumlah kegiatan fisik dan non fisik pada kawasan prioritas nasional	20	4	5	5	100	4	13	65.00
<b>1 3</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase dokumen PSETK yang dihasilkan</b>								
	Operasional IPDMIP	Dokumen PSETK pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	100	20	20	20	100	20	60	60.00

Pada tabel evaluasi hasil renja tahun 2022 s.d Triwulan II menggambarkan target kinerja renstra.

## **2.2. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA**

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan penganggaran yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pembangunan, pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sidenreng Rappang

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
  - a. Subag Umum dan Kepegawaian

- b. Subag Perencanaan
  - c. Subag Keuangan
3. Unsur Pelaksana yaitu :
- a. Bidang Perencanaan Perekonomian , Sumber Daya Alam, Sosial dan Pembangunan Manusia yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Bidang SDA, Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sub Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian
  - b. Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan dan Pemerintahan yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Bidang Infrastruktur, Sub Bidang Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sub Bidang Perencanaan Bidang Kewilayahan.
  - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah yang terdiri dari Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan, Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
  - d. Bidang Perencanaan Pengendalian & Evaluasi yang terdiri dari Sub Bidang Data dan Informasi, Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Evaluasi.

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis dan terarah masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya koordinasi antar OPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bappelitbangda.
3. Terbatasnya kemampuan aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu
6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan

untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangun

TABEL 3

## REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>			<b>100%</b>	<b>9,363,023,200</b>				<b>100%</b>	<b>9,363,023,200</b>	
1	<b>PERENCANAAN</b>	Bappedalibangda		<b>100%</b>	<b>8,633,931,100</b>	<b>PERENCANAAN</b>	Bappedalibangda		<b>100%</b>	<b>8,633,931,100</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>5,412,572,700</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>5,412,572,700</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>24,009,700</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>24,009,700</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perangkat daerah	8 Dok	19,125,200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perangkat daerah	8 Dok	19,125,200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	5 Lap	2,681,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	5 Lap	2,681,400	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	2,203,100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	2,203,100	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4,207,238,100</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4,207,238,100</b>	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang x 14 Bulan	4,166,568,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang x 14 Bulan	4,166,568,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25,979,200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25,979,200	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappedalibangda	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	14,690,900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappedalibangda	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	14,690,900	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>5,715,700</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>5,715,700</b>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5,715,700	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5,715,700	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>418,595,500</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>418,595,500</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,569,200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,569,200	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7,633,800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7,633,800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5,400,000	
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappedalibangda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	399,992,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappedalibangda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155 Laporan	399,992,500	
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bappedalibangda	<b>Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>153,131,100</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Bappedalibangda	<b>Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>105,322,600</b>	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	87,808,500	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	40,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	65,322,600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	65,322,600	
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bappedalibangda	<b>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>383,233,600</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Bappedalibangda	<b>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>383,233,600</b>	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	414 Laporan	4,270,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	414 Laporan	4,270,000	
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66,420,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66,420,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	312,543,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	312,543,600	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>220,649,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>220,649,000</b>	
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappedalibangda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	109,530,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappedalibangda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	109,530,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	11,119,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	11,119,000	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Bappedalibangda	<b>Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>1,534,150,100</b>	<b>Program : PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Bappedalibangda	<b>Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>1,534,150,100</b>	
<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD</b>			<b>100%</b>	<b>203,722,200</b>	<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD</b>			<b>100%</b>	<b>203,722,200</b>		
<b>Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada</b>			<b>100%</b>	<b>1,312,391,000</b>	<b>Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada</b>			<b>100%</b>	<b>1,312,391,000</b>		
8	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>					<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>					
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 dokumen	126,178,400	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 dokumen	126,178,400	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	195,844,200	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	195,844,200	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	34,576,500	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	34,576,500	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	210,245,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	210,245,000	



	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1400 Usulan	23,065,200	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1400 Usulan	23,065,200	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	722,481,700	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	722,481,700	
	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>221,759,100</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>221,759,100</b>	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 Masukan	221,759,100	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 Masukan	221,759,100	
	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>203,722,200</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>203,722,200</b>	
<b>10</b>	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappedalibangda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan	203,722,200	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappedalibangda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan	203,722,200	
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>100%</b>	<b>567,181,500</b>	<b>Program : PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>100%</b>	<b>567,181,500</b>	
			<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>100%</b>	<b>321,447,800</b>			<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>100%</b>	<b>321,447,800</b>	
			<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	<b>100%</b>	<b>594,856,800</b>			<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	<b>100%</b>	<b>594,856,800</b>	

	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>100%</b>	<b>567,181,500</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>100%</b>	<b>567,181,500</b>	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	3 Dokumen	25,251,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	3 Dokumen	25,251,000	
<b>11</b>	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalibangda	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	19,300,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappedalibangda	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	19,300,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12 Laporan	50,344,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12 Laporan	50,344,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12 Laporan	146,202,500	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	12 Laporan	146,202,500	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	105,180,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	105,180,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	9,620,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	9,620,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	50,550,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	50,550,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	160,734,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	160,734,000	

	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>100%</b>	<b>321,447,800</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>100%</b>	<b>321,447,800</b>	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	38,860,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	38,860,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	3 Perangkat Daerah	9,620,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	3 Perangkat Daerah	9,620,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	3 Perangkat Daerah	25,250,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	3 Perangkat Daerah	25,250,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	105,570,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	105,570,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	35,919,300	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	35,919,300	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	9,620,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	9,620,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	21,210,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 Perangkat Daerah	21,210,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	75,398,500	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	75,398,500	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	<b>100%</b>	<b>594,856,800</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>	<b>100%</b>	<b>594,856,800</b>	

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	25,252,700	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	25,252,700	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	25,252,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	25,252,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	25,856,100	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	25,856,100	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	2 Dokumen	169,438,300	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	2 Dokumen	169,438,300	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	20,201,300	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	20,201,300	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	19,189,600	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	19,189,600	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	163,215,500	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	163,215,500	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan	146,451,300	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan	146,451,300	
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>729,092,100</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>729,092,100</b>	
	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		<b>Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan</b>	<b>100%</b>	<b>729,092,100</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		<b>Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan</b>	<b>100%</b>	<b>729,092,100</b>	
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>		<b>Persentase Fasilitasi Hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>419,724,900</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>		<b>Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>419,724,900</b>	

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	108,821,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	108,821,000	
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Dan/Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Laporan	83,584,800	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Dan/Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Laporan	83,584,800	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	63,242,500	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	63,242,500	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	87,920,600	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	87,920,600	
Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	26,900,000	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	26,900,000	
Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekeloh dengan baik	1 Laporan	49,256,000	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekeloh dengan baik	1 Laporan	49,256,000	
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>104,252,000</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>104,252,000</b>	
Penelitian dan Pengembangan bidang lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	104,252,000	Penelitian dan Pengembangan bidang lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	104,252,000	
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		<b>Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah yang diterapkan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>205,115,200</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		<b>Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah</b>	<b>100%</b>	<b>205,115,200</b>	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	205,115,200	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	205,115,200	





**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD TAHUN 2022**



### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Tujuan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 berdasarkan rumusan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dirumuskan untuk mencapai target janji bupati dan wakil bupati yang tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang termaktub dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Searah dengan itu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jangka Menengah merumuskan Tujuan dan Sasaran Tahun 2018 - 2023 Tertuang dalam Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2018-2023 sesuai pada Tabel di bawah :



No	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah Dan Tahunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD			100%	100%	100%
				Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD			96%	97%	100%
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan	Tingkat pemanfaatan hasil kajian yang ditindaklanjuti	Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan			100%	100%	100%

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pembangunan, fisik dan prasarana. Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien, dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis dan terarah masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

**a. Belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah sehingga perumusan kebijakan kurang kualitas**

Dalam konteks pembangunan tahap perencanaan merupakan hulu dan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan sehingga kualitas dokumen perencanaan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan sebuah pembangunan yang telah direncanakan . Adapun kelemahan kelemahan dalam penyempurnaan yang sering terjadi diantaranya terkadang adanya itervensi ke[entingan individu/golongan sehingga perencanaan mengarah pada hal yang diinginkan bukan pada hal yang diperlukan, kurangnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan, belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal tersebut

mengakibatkan struktur kinerja anggaran dalam dokumen perencanaan tidak jelas antara input, output dan outcome terhadap need/problem, serta informasi kinerja (indikator dan sasaran kinerja output dan outcome).

**b. Lemahnya kapasitas aparat perencana dilihat dari kualifikasi pendidikan dan kemampuan teknis perencana dalam hal ini tenaga fungsional perencana**

Salah satu upaya peningkatan kinerja aparatur Bappelitbangda adalah dengan melakukan evaluasi kinerja aparatur. Evaluasi kinerja digunakan untuk menguji efektivitas dan efisiensi kinerja ASN dengan menggunakan beberapa indikator seperti kedisiplinan, tanggungjawab hingga capaian kinerja. Evaluasi kinerja yang maksimal di hadapkan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia. Saat ini Bappelitbangda memiliki 44 orang ASN dan belum sepenuhnya pernah mengikuti kegiatan bimtek/workshop perencanaan dan hingga saat ini belum memiliki tenaga fungsional perencana.

**c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perencanaan**

Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki saat ini masih terbatas sehingga proses penyelesaian pekerjaan terkadang tidak sesuai target/ rencana karena beberapa pekerjaan harus dikerjakan secara bergantian karena fasilitas yang terbatas

**d. Hasil Kajian/ Penelitian belum sepenuhnya dapat dimplementasikan sebagai penyempurnaan perencanaan Pembangunan Daerah**

Hasil penelitian/kajian yang dihasilkan baik oleh lembaga, perangkat daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan hasilnya sebagai bahan dalam penyempurnaan pembangunan daerah, dalam hal ini bappelitbangda perlu melakukan langkah strategis agar kajian/ penelitian yang telah dilakukan bisa dimanfaatkan.

#### **e. Masih kurangnya upaya dalam menciptakan Inovasi**

Saat ini masih sebahagian kecil lembaga/perangkat daerah yang telah melakukan inovasi dan diperlukan adanya langkah strategis bagaimana mendorong agar dapat melakukan inovasi dengan melakukan diskusi/sosialisasi terhadap manfaat adanya inovasi dan perlu juga melakukan studi banding/kunjungan ke daerah-daerah yang telah melakukan inovasi dan juga mengikuti/menghadiri event, pameran, workshop tentang inovasi

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappelitbangda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2018–2023, seperti Visi dan misi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang dijelaskan pada Bab. I diatas.

### **4.3. PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai “*pengarah*” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bappelitbangda sumber Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum DAU Tahun 2023

Sejalan dengan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”**, maka program dan kegiatan yang dirancang Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 terdiri dari :

### **Program/Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2023**

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu</b>
	<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD</b>
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada</b>
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah</b>
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
<b>Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>
	<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA</b>
	<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Wilayah
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan</b>
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah</b>
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Dan/Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekeloh dengan baik
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan Perangkat Daerah</b>
Penelitian dan Pengembangan bidang lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah</b>
Desiminasi,jenis dan prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Tabel 5

## RENCANA PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2023 dan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Bappelitbangda	100%	5,412,572,700	APBD		100%	5,428,834,419
	01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		100%	24,009,700			100%	25,120,963
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dok	19,125,200			8 Dok	20,200,000
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Lap	2,681,400			5 Lap	2,681,843
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Lap	2,203,100			3 Lap	2,239,120
	02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		100%	4,207,238,100			100%	4,207,222,485
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		46 Orang x 14 Bulan	4,166,568,000			46 Orang x 14 Bulan	4,166,568,000
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	25,979,200			12 Dokumen	25,963,585

	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		18 Laporan	14,690,900			18 Laporan	14,690,900
2	03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah</b>		<b>100%</b>	<b>5,715,700</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>5,783,967</b>
	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	5,715,700			12 Laporan	5,783,967
	06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah</b>		<b>100%</b>	<b>418,595,500</b>			<b>100%</b>	<b>235,815,080</b>
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5,569,200			4 Paket	5,569,200
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Tersedia		4 Paket	7,633,800			4 Paket	7,633,800
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		5 Dokumen	5,400,000			5 Dokumen	5,508,540
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		180 Laporan	399,992,500			180 Laporan	217,103,540
	07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>100%</b>	<b>105,322,600</b>			<b>100%</b>	<b>105,322,600</b>
	01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Unit	40,000,000	<b>APBD</b>		10 Unit	40,000,000
	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 Unit	65,322,600			20 Unit	65,322,600
	02	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan</b>		<b>100%</b>	<b>383,233,600</b>			<b>100%</b>	<b>575,564,433</b>
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		414 Laporan	4,270,000	<b>APBD</b>		414 Laporan	4,284,420
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	66,420,000			12 Laporan	81,575,357

04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	312,543,600	APBD		12 Laporan	489,704,656
08	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>		<b>100%</b>	<b>220,649,000</b>			<b>100%</b>	<b>274,004,891</b>
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15 Unit	109,530,000			15 Unit	109,870,891
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	100,000,000			1 Unit	153,015,000
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		30 Unit	11,119,000			30 Unit	11,119,000
02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu</b>	Bappelitbangda	<b>100%</b>	<b>1,534,150,100</b>			<b>100%</b>	<b>1,534,150,100</b>
		<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD</b>		<b>100%</b>	<b>203,722,200</b>			<b>100%</b>	<b>203,722,200</b>
01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada</b>		<b>100%</b>	<b>1,312,391,000</b>			<b>100%</b>	<b>1,290,254,959</b>
01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		2 dokumen	126,178,400			2 dokumen	76,000,000
03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		2 Berita Acara	195,844,200			2 Berita Acara	195,844,200
04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		1 Berita Acara	34,576,500			2 Berita Acara	35,300,000
05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	210,245,000			1 Berita Acara	210,245,000
06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		1400 Usulan	23,065,200			1400 Usulan	50,384,059

07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		3 Dokumen	722,481,700			2 Dokumen	722,481,700
02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah</b>		100%	221,759,100			100%	221,759,100
01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		4 Masukan	221,759,100			4 Masukan	221,759,100
03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		100%	203,722,200	APBD		100%	200,000,000
03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		4 Laporan	203,722,200			4 Laporan	200,000,000
03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Bappelitbangda	100%	567,181,500	APBD		100%	487,802,178
		<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA</b>		100%	321,447,800			100%	346,551,859
		<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>		100%	594,856,800			100%	798,002,242



01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>100%</b>	<b>567,181,500</b>			<b>100%</b>	<b>487,802,178</b>
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)		33 Dokumen	25,251,000			33 Dokumen	25,250,000
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		12 Perangkat Daerah	19,300,000			12 Perangkat Daerah	20,200,000
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		12 Laporan	50,344,000			12 Laporan	55,550,000
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		11 Laporan	146,202,500			11 Laporan	85,822,178
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		24 Dokumen	105,180,000			24 Dokumen	18,180,000
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		6 Perangkat Daerah	9,620,000			6 Perangkat Daerah	25,250,000
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		6 Perangkat Daerah	50,550,000			6 Perangkat Daerah	55,550,000
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja		6 Laporan	160,734,000			6 Laporan	202,000,000

			dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia						
03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA</b>		<b>100%</b>	<b>321,447,800</b>			<b>100%</b>	<b>346,551,859</b>
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		3 Dokumen	38,860,000			3 Dokumen	23,230,000
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian		3 Perangkat Daerah	9,620,000			3 Perangkat Daerah	25,250,000
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian		3 Perangkat Daerah	25,250,000			3 Perangkat Daerah	25,250,000
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		3 Laporan	105,570,000			3 Laporan	158,570,000
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		3 Dokumen	35,919,300			3 Dokumen	15,289,352
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		3 Perangkat Daerah	9,620,000			3 Perangkat Daerah	25,250,000
07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA		3 Perangkat Daerah	21,210,000			3 Perangkat Daerah	21,210,000

08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		3 Laporan	75,398,500			3 Laporan	52,502,507
03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>		<b>100%</b>	<b>594,856,800</b>			<b>100%</b>	<b>798,002,242</b>
01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		6 Dokumen	25,252,700			6 Dokumen	25,250,000
02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		2 Perangkat Daerah	25,252,000			2 Perangkat Daerah	25,250,000
03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		2 Perangkat Daerah	25,856,100			2 Perangkat Daerah	23,230,000
04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur		2 Dokumen	169,438,300			2 Dokumen	209,482,125
05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		9 Dokumen	20,201,300			9 Dokumen	20,200,000
06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		3 Perangkat Daerah	19,189,600			3 Perangkat Daerah	19,190,000

07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		3 Perangkat Daerah	163,215,500			3 Perangkat Daerah	328,950,117
08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan		3 Laporan	146,451,300			3 Laporan	146,450,000
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>729,092,100</b>				<b>624,840,100</b>
04	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan</b>	Bappelitbangda	<b>100%</b>	<b>729,092,100</b>			<b>100%</b>	<b>624,840,100</b>
01	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>419,724,900</b>			<b>100%</b>	<b>419,724,900</b>
01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		1 Laporan	108,821,000			1 Laporan	108,821,000
	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekeloh dengan baik		1 Laporan	49,256,000			1 Laporan	49,256,000
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Dan/Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan		1 Laporan	83,584,800			1 Laporan	83,584,800
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		1 Laporan	63,242,500			1 Laporan	63,242,500

		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		1 Laporan	87,920,600			1 Laporan	87,920,600
		Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		1 Laporan	26,900,000			1 Laporan	26,900,000
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan Perangkat Daerah</b>		1 Dokumen	<b>104,252,000</b>			1 Dokumen	-
		Penelitian dan Pengembangan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup		4 Kegiatan	104,252,000			4 Kegiatan	
	<b>04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah</b>		100%	<b>205,115,200</b>			100%	<b>205,115,200</b>
	01	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		1 Laporan	205,115,200			1 Laporan	205,115,200

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

**Output Rencana Kerja** Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah **Program Tahunan** Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Kerja (RENJA) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappelitbangda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.









